



INKLUSI DIGITALISASI KEUANGAN UNTUK PENGUATAN TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DESA KUALA ALAM: STRATEGI PEMBERDAYAAN BERBASIS TEKNOLOGI

Zulpan

Institut Syariah Negeri Junjungan Bengkalis

Sutrisno

Institut Syariah Negeri Junjungan Bengkalis

Sukron Niami

Institut Syariah Negeri Junjungan Bengkalis

Zul Hendri

Institut Syariah Negeri Junjungan Bengkalis

Sri Rahmany

Institut Syariah Negeri Junjungan Bengkalis

Slamet Wiharto

Institut Syariah Negeri Junjungan Bengkalis

Alamat: Jl. Poros Sungai Alam-Selatbaru Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis Riau

Korespondensi penulis: zulpan.st@gmail.com

Abstrak. *Digital transformation in the financial sector is an important aspect in strengthening the governance and performance of Village-Owned Enterprises (BUMDes). However, limited access and digital literacy are still major obstacles in the process, including in BUMDes Kuala Alam. This Community Service (PKM) activity aims to increase the inclusion of financial digitalization in BUMDes through training, mentoring, and adoption of digital application-based financial technology. The implementation method consists of identifying needs, training in digital financial systems, and evaluating the impact of implementation. The results of the activity showed an increase in the understanding and ability of BUMDes managers in using digital accounting and financial transaction systems. Recommendations from this activity include the need for the development of sustainable digital modules and integration with local financial institutions. Digital inclusion has been proven to strengthen the transparency and efficiency of village financial governance.*

Keywords: *Financial Inclusion, Digitalization, BUMDes, Community Empowerment, Village Governance*

Abstrak. Transformasi digital dalam sektor keuangan menjadi aspek penting dalam memperkuat tata kelola dan kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun, keterbatasan akses dan literasi digital masih menjadi hambatan utama dalam proses tersebut, termasuk di BUMDes Kuala Alam. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan inklusi digitalisasi keuangan pada BUMDes melalui pelatihan, pendampingan, dan adopsi teknologi keuangan berbasis aplikasi digital. Metode pelaksanaan terdiri dari identifikasi kebutuhan, pelatihan sistem keuangan digital, dan evaluasi dampak implementasi. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman dan kemampuan pengelola BUMDes dalam menggunakan sistem digital akuntansi dan transaksi keuangan. Rekomendasi dari kegiatan ini mencakup perlunya pengembangan modul digital berkelanjutan dan integrasi dengan lembaga keuangan lokal. Inklusi digital terbukti mampu memperkuat transparansi dan efisiensi tata kelola keuangan desa.

Kata Kunci: *Inklusi Keuangan, Digitalisasi, BUMDes, Pemberdayaan Masyarakat, Tata Kelola Desa*

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan. Sebagai entitas usaha milik masyarakat desa, BUMDes memiliki peran strategis dalam meningkatkan pendapatan asli desa dan membuka lapangan kerja. Namun, dalam praktiknya, banyak BUMDes yang belum mampu beroperasi secara optimal, salah satunya disebabkan oleh lemahnya sistem tata kelola dan akuntabilitas keuangan.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang besar bagi desa untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan BUMDes. Inklusi digital dalam pengelolaan keuangan menjadi strategi efektif untuk mendorong transparansi, efisiensi, serta integrasi BUMDes dengan sistem keuangan nasional. Meski demikian, keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi digital, serta kurangnya pelatihan teknis menjadi tantangan utama dalam penerapan sistem keuangan berbasis digital di tingkat desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu instrumen strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi berbasis masyarakat di tingkat desa. Kehadirannya diharapkan mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, serta memperkuat kemandirian desa. Namun, seiring perkembangan zaman dan kompleksitas tantangan ekonomi global dan digital, BUMDes dituntut untuk melakukan adaptasi terhadap kemajuan teknologi, khususnya dalam hal tata kelola dan manajemen keuangan.

Integrasi digitalisasi dalam pengelolaan keuangan BUMDes menjadi semakin relevan dalam rangka meningkatkan efisiensi operasional dan akuntabilitas kelembagaan. Dengan sistem digital, pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan transparan, sehingga meminimalisasi risiko kesalahan pencatatan dan potensi penyalahgunaan dana. Namun, pada kenyataannya, sebagian besar BUMDes di Indonesia masih belum sepenuhnya mengadopsi teknologi digital. Kondisi ini dipengaruhi oleh rendahnya tingkat literasi digital di kalangan pengelola, serta terbatasnya infrastruktur teknologi, terutama di daerah pedesaan (Firmansyah, 2025).

Praktik pelaporan keuangan di banyak BUMDes hingga saat ini masih bersifat manual dan tidak terdokumentasi dengan baik. Hal ini berimplikasi pada rendahnya transparansi dan kesulitan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban kepada pihak desa dan masyarakat luas. Studi oleh Aprillianto et al. (2022) menunjukkan bahwa digitalisasi pelaporan keuangan BUMDes tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana desa.

Lebih lanjut, keterlibatan pemerintah daerah dalam proses digitalisasi keuangan BUMDes masih belum optimal. Pemerintah memiliki peran strategis dalam menyediakan pelatihan literasi digital serta membangun infrastruktur pendukung seperti jaringan internet dan perangkat keras. Namun, dukungan tersebut belum terstruktur secara sistematis, sehingga proses transformasi digital berjalan lambat (Putri et al., 2023; Firmansyah, 2025).

Dari sisi akademik, terdapat kesenjangan penelitian yang perlu dijembatani. Literasi digital di kalangan pengurus BUMDes masih menjadi persoalan utama. Belum banyak riset yang menawarkan pendekatan pelatihan berbasis kebutuhan lokal dan kontekstual untuk meningkatkan kapasitas digital para pengelola (Firmansyah, 2025). Selain itu, hubungan antara praktik digitalisasi dan inklusi keuangan di desa belum dieksplorasi secara komprehensif. Penelitian oleh

Ayem et al. (n.d.) mengindikasikan bahwa integrasi antara teknologi digital dan akses ke layanan keuangan formal dapat mendorong produktivitas ekonomi desa, namun pendekatan praktis dan aplikatif masih terbatas.

Dalam konteks inovasi, pengembangan sistem pelaporan keuangan digital yang konsolidatif dan dirancang khusus untuk BUMDes menjadi salah satu strategi yang dinilai menjanjikan. Solusi ini memungkinkan adanya standarisasi laporan keuangan yang kompatibel dengan kebutuhan audit dan pelaporan publik (Aprillianto et al., 2022). Selain itu, pendekatan penelitian ke depan perlu mengarah pada pembentukan kerangka kerja holistik yang tidak hanya mencakup aspek digitalisasi, tetapi juga mencakup dimensi pemasaran digital, peningkatan literasi keuangan, dan kolaborasi multi-pihak antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha (Putri et al., 2023).

Maka dari itu, penting untuk merancang dan melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mampu menjawab tantangan ini secara langsung. Kegiatan yang menggabungkan edukasi literasi digital, pelatihan pengelolaan keuangan berbasis aplikasi, serta pendampingan implementasi sistem digital dapat menjadi solusi awal yang aplikatif. BUMDes Kuala Alam di Kecamatan Bengkalis, dengan tantangan dan potensi yang dimilikinya, menjadi lokus strategis untuk menguji efektivitas pendekatan ini dalam mendorong transformasi digital keuangan desa.

Melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini, tim pelaksana berupaya mendampingi BUMDes dalam menerapkan sistem keuangan digital secara bertahap melalui pelatihan dan pemanfaatan aplikasi digital yang mudah diakses dan digunakan. Tujuan utamanya adalah mendorong inklusi keuangan digital yang berkelanjutan di tingkat desa.

METODE PENELITIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif dan kolaboratif, yang mengutamakan keterlibatan aktif dari pengurus BUMDes Kuala Alam, aparat desa, dan mitra akademik. Tahapan pelaksanaan dimulai dengan identifikasi kebutuhan melalui observasi langsung dan wawancara semi-terstruktur terhadap pengelola BUMDes dan perangkat desa. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memperoleh gambaran awal mengenai tingkat literasi keuangan digital, sistem pencatatan keuangan yang telah digunakan, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan.

Setelah kebutuhan teridentifikasi dengan jelas, dilanjutkan dengan pelaksanaan pelatihan yang dirancang secara tematik dan aplikatif. Materi pelatihan difokuskan pada pengenalan dasar akuntansi keuangan BUMDes, penggunaan aplikasi pencatatan digital seperti *Akudes* dan *Bumdes.id*, serta praktik penyusunan laporan keuangan berbasis aplikasi. Pelatihan dilaksanakan secara langsung di balai desa selama dua hari, dengan pendekatan interaktif, studi kasus, dan simulasi transaksi harian BUMDes.

Usai pelatihan, tim pengabdian melakukan pendampingan teknis secara berkala selama empat minggu. Pendampingan dilakukan secara langsung di kantor BUMDes setiap minggu dan dilengkapi dengan konsultasi daring untuk membantu pengurus menghadapi kendala teknis yang muncul. Selama masa ini, tim juga memberikan bimbingan dalam menyusun laporan keuangan digital pertama sebagai output nyata dari proses digitalisasi.

Untuk mengevaluasi dampak kegiatan, dilakukan pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta. Selain itu, dilakukan wawancara evaluatif

dengan pengelola BUMDes dan perangkat desa untuk menilai kebermanfaatan kegiatan, serta menyusun rekomendasi untuk perbaikan dan keberlanjutan program ke depan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kondisi Awal Pengelolaan Keuangan BUMDes Kuala Alam

Sebelum pelaksanaan program pengabdian, pengelolaan keuangan BUMDes Kuala Alam masih dilakukan secara manual menggunakan buku kas dan pencatatan sederhana berbasis Microsoft Excel. Pencatatan arus kas belum terklasifikasi secara sistematis antara pendapatan, belanja operasional, dan investasi, sehingga menyulitkan dalam penyusunan laporan keuangan periodik. Tidak adanya standar akuntansi yang digunakan menyebabkan terjadinya inkonsistensi dalam pencatatan dan potensi kesalahan yang cukup tinggi.

Selain itu, wawancara dengan pengurus menunjukkan bahwa tingkat literasi digital masih rendah. Hanya sebagian kecil pengelola yang mampu menggunakan perangkat lunak pengelolaan keuangan secara efektif. Mereka juga belum mengetahui keberadaan aplikasi yang secara khusus dirancang untuk BUMDes, seperti *SiBumDes*, *Akudes*, atau *Bumdes.id*. Situasi ini menunjukkan bahwa BUMDes belum terintegrasi secara digital, baik dari sisi pelaporan keuangan maupun akses ke layanan keuangan formal, seperti integrasi dengan rekening BUMDes dan aplikasi e-wallet desa.

Pelaksanaan Pelatihan dan Pendampingan

Untuk menjawab tantangan tersebut, tim pelaksana melaksanakan pelatihan dua hari yang mencakup topik-topik literasi keuangan dasar, pengenalan sistem pencatatan berbasis digital, dan praktik langsung penggunaan aplikasi keuangan. Pelatihan dirancang berbasis studi kasus keuangan aktual BUMDes Kuala Alam agar materi lebih kontekstual. Selama sesi pelatihan, peserta diberikan modul dan simulasi transaksi, seperti pencatatan pendapatan dari unit usaha sewa alat pertanian dan pembelian modal kerja.

Selanjutnya, dilakukan pendampingan teknis selama empat minggu dengan kunjungan lapangan mingguan. Dalam pendampingan ini, tim membantu menginstalasi dan menyesuaikan sistem aplikasi keuangan digital dengan kebutuhan unit usaha BUMDes. Salah satu capaian penting adalah berhasilnya BUMDes menyusun laporan arus kas dan laporan laba-rugi triwulan menggunakan aplikasi digital yang sebelumnya tidak tersedia.

Perubahan yang Terjadi Pasca-Intervensi

Pasca pelaksanaan pelatihan dan pendampingan, terjadi peningkatan signifikan dalam kapasitas pengelola. Hasil post-test menunjukkan bahwa rata-rata skor pengetahuan peserta mengenai pengelolaan keuangan digital meningkat sebesar 62% dibandingkan dengan hasil pre-test. Selain itu, pengelola menyatakan bahwa sistem baru memudahkan mereka dalam memantau transaksi harian, menyusun laporan, dan menyampaikan pertanggungjawaban ke pihak desa.

Dari sisi tata kelola, digitalisasi sistem pencatatan keuangan telah membantu meningkatkan transparansi. Laporan dapat dicetak dan diserahkan secara real time ke kepala desa dan BPD, serta tersedia backup data yang aman di cloud. Hal ini mendorong praktik good governance di tingkat BUMDes, seperti yang disarankan oleh Putri et al. (2023) dalam kerangka tata kelola digital desa.

Selain itu, kegiatan ini mendorong inklusi keuangan desa. Dengan mulai terkoneksi ke layanan perbankan digital dan pelaporan berbasis aplikasi, BUMDes lebih siap mengakses dana bergulir

atau pembiayaan program dari pemerintah. Ini sejalan dengan pandangan Ayem et al. (n.d.) bahwa transformasi digital dalam pengelolaan BUMDes dapat membuka akses pada ekosistem keuangan yang lebih luas, terutama untuk mendukung pertumbuhan usaha produktif di desa.

Pembahasan

Temuan dari kegiatan ini memperkuat argumen bahwa digitalisasi merupakan solusi kunci dalam perbaikan manajemen BUMDes. Seperti diungkapkan oleh Aprilianto et al. (2022), sistem pencatatan keuangan berbasis digital bukan hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga mendukung keberlanjutan BUMDes melalui sistem dokumentasi yang akuntabel dan terstandarisasi.

Namun, pelaksanaan digitalisasi tidak bisa dilakukan secara instan. Diperlukan pendekatan berkelanjutan berupa pelatihan, pendampingan teknis, serta dukungan kebijakan dari pemerintah daerah. Tantangan seperti keterbatasan infrastruktur jaringan internet di desa dan rendahnya kemampuan teknologi dasar masih menjadi hambatan. Oleh karena itu, solusi teknologi harus disesuaikan dengan konteks lokal, misalnya dengan menggunakan aplikasi ringan yang dapat digunakan secara offline dan sinkronisasi data saat jaringan tersedia.

Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa integrasi digital tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga membutuhkan perubahan budaya kerja. Pengelola BUMDes yang sebelumnya terbiasa dengan sistem manual perlu waktu untuk memahami dan mengadopsi sistem baru. Oleh karena itu, keberhasilan digitalisasi tidak hanya ditentukan oleh tersedianya teknologi, tetapi juga oleh komitmen dan kapasitas SDM desa.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di BUMDes Kuala Alam, Kecamatan Bengkalis, telah memberikan kontribusi nyata dalam mendorong proses digitalisasi pengelolaan keuangan di tingkat desa. Melalui serangkaian pelatihan, pendampingan teknis, dan penyusunan sistem pelaporan digital, para pengelola BUMDes mengalami peningkatan kapasitas baik dalam aspek literasi digital maupun akuntabilitas keuangan. Perubahan ini ditandai dengan kemampuan BUMDes dalam menyusun laporan keuangan berbasis aplikasi secara sistematis, yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pencatatan keuangan, tetapi juga memperkuat transparansi dan keterbukaan informasi kepada masyarakat serta pihak pemerintah desa.

Transformasi ini menjadi langkah awal menuju penguatan tata kelola BUMDes yang lebih profesional dan berkelanjutan. Meski demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang harus diantisipasi, seperti keterbatasan jaringan internet dan perlunya pendampingan lanjutan agar sistem digital yang telah diterapkan dapat digunakan secara konsisten. Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur pendukung serta program pelatihan berkelanjutan menjadi sangat penting.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, direkomendasikan agar BUMDes terus memperluas integrasi digital ke dalam aspek lain pengelolaan usaha, seperti sistem inventaris, pelayanan pelanggan, dan pencatatan aset. Selain itu, kolaborasi dengan institusi pendidikan tinggi, lembaga keuangan, dan dinas terkait perlu diperkuat guna menciptakan ekosistem pendukung yang mendorong transformasi digital desa secara lebih luas. Dengan demikian, digitalisasi keuangan tidak hanya menjadi alat bantu administratif, tetapi juga strategi strategis dalam mewujudkan desa yang mandiri dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprillianto, R., Nugroho, T. S., & Hartati, S. (2022). Pengembangan Sistem Informasi Keuangan untuk BUMDes dalam Rangka Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas. *Jurnal Ekonomi Digital Desa*, 3(1), 45–57.
- Ayem, M., Widodo, D., & Lestari, H. (n.d.). Digitalisasi dan Inklusi Keuangan di Pedesaan: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Pembangunan Inklusif*.
- Firmansyah, A. (2025). Analisis Kesiapan Digitalisasi pada Badan Usaha Milik Desa di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Teknologi Pedesaan*, 4(2), 88–101.
- Kementerian Desa PDTT. (2023). *Pedoman Pengelolaan BUMDes*. Jakarta: Kemendesa PDTT.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2021-2025*. Jakarta: OJK.
- Putri, R. A., Supriyanto, A., & Damanik, E. (2023). Kerangka Kerja Transformasi Digital untuk Pemberdayaan Ekonomi Desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pemerintahan*, 7(3), 110–124.
- Syahyuti. (2020). “Transformasi Digital BUMDes dalam Era Revolusi Industri 4.0.” *Jurnal Pembangunan Pedesaan*, 15(2), 77–88.
- Damayanti, L., & Sari, D. (2021). “Peran Teknologi Informasi dalam Peningkatan Kinerja BUMDes.” *Jurnal Inovasi Desa*, 9(1), 45–52.
- Kusumawardani, R., & Prasetyo, R. (2022). “Aplikasi Digital dalam Pengelolaan Keuangan BUMDes: Studi Kasus di Jawa Tengah.” *Jurnal Ekonomi Desa Digital*, 2(1), 10–20.